

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan bisnis yang semakin kuat memang menjadi tantangan signifikan bagi pelaku usaha. Salah satu usaha yang memiliki tantangan dalam hal persaingan kinerja adalah UMKM, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha. Literasi keuangan menjadi salah satu elemen kunci yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan meningkatnya persaingan dan tantangan dalam UMKM, literasi keuangan menjadi salah satu faktor krusial untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha membuat keputusan yang lebih bijak, mengelola risiko, dan meningkatkan daya saing Pelaku UMKM di pasar. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan UMKM bordir (Hilmawati, 2021: 2).

Di bawah ini adalah pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1

Pertumbuhan UMKM Di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah (Juta)	64,39	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)	-	1,98	-2,24	2,28	-0,70	1,52

Sumber: (Kadin, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa penurunan jumlah UMKM pada tahun 2020 dan 2022, serta pertumbuhan yang hanya mencapai 1% pada tahun 2023, mencerminkan tantangan serius dalam keberlanjutan sektor ini. Masalah utama yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya akses ke modal kerja dan minimnya dukungan transformasi digital, menggaris bawahi perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama pemerintah (Kadin, 2023). UMKM di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengelolaan keuangan dan adaptasi digital. Dukungan pemerintah yang lebih efektif, baik dalam bentuk kemudahan akses permodalan maupun transformasi digital, adalah kunci untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan beradaptasi dengan teknologi, UMKM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional (Marrisa, 2023).

Kinerja UMKM adalah tingkat keberhasilan atau efektivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencapai tujuan bisnisnya, baik dari segi keuangan, Operasionalisasi, maupun non-finansial. Kinerja ini mencerminkan bagaimana UMKM mampu bersaing, bertahan (Hasibuan, 2020: 9). Masalah manajerial yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tantangan besar yang memengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Banyak pengusaha kecil yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan bisnisnya cenderung tidak terorganisir dengan baik. Pengelolaan bisnis yang kurang terorganisir menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk mencapai kinerja yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan

manajerial melalui pelatihan, literasi keuangan, digitalisasi, dan dukungan pemerintah (Marrisa, 2023: 3).

Literasi Keuangan merupakan sebagai keahlian yang dimiliki individu juga kemampuannya untuk mengelola pendapatannya sehingga mendapatkan peningkatan kesejahteraan secara finansial (Houston, 2020: 78). Literasi keuangan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja UMKM, semakin baik literasi yang dimiliki maka pertimbangan bisnis akan semakin matang khususnya dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, UMKM dengan literasi keuangan tinggi cenderung memiliki manajemen keuangan yang lebih baik, sehingga kinerja usahanya meningkat (Kemala Fikri, 2023, Aribawa, 2019: 7, Alaraj, H., & Bakri, A, 2020: 6, Herrera, 2023: 3). Permasalahan literasi keuangan bersumber dari banyaknya UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran serta menyulitkan untuk mengukur kinerja bisnis secara akurat. Banyak pelaku UMKM menghabiskan sebagian besar waktu untuk Operasionalisasi harian bisnis, sehingga tidak memiliki waktu atau dana untuk berinvestasi dalam pelatihan keuangan. Banyak UMKM yang tidak memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman, terutama karena kurangnya jaminan atau sejarah kredit yang memadai.

Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau (Mallick, S. K, 2019: 89). Inklusi keuangan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja UMKM, dimana

semakin baik inklusi keuangan maka akan semakin baik pelaku UMKM dalam mempertimbangkan keuangannya (Oppernan, 2023: 2), (Lee, C.-C., Wang, C.-W. and Ho, S.-J, 2020: 3), dan (Abor, J.Y., Adjasi, C.K. and Lensink, R, 2020: 6). Inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Permasalahan inklusi keuangan bersumber dari banyaknya lembaga keuangan memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti kebutuhan akan jaminan fisik atau sejarah kredit yang baik. Hal tersebut membuat banyak pelaku UMKM merasa enggan atau tidak mampu mengajukan pinjaman atau produk keuangan lainnya.

Sikap keuangan diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan yang diaplikasikan ke dalam sikap (Pankow dalam Dewi, A. S, 2021: 5, Ratnawati, 2023: 4, Rahadjeng, 2023: 3). Sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Haryadi, 2023: 2). Permasalahan dari sikap keuangan bersumber dari sikap pelaku UMKM sering kali melakukan pengeluaran tanpa perencanaan yang matang, seperti pembelian peralatan atau bahan baku yang tidak mendesak, yang dapat mengganggu aliran kas dan anggaran Operasionalisasi.

Kinerja UMKM adalah tingkat keberhasilan atau efektivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencapai tujuan bisnisnya, baik dari segi keuangan, Operasionalisasi, maupun non-finansial. Kinerja ini mencerminkan bagaimana UMKM mampu bersaing, bertahan (Hasibuan, 2020: 9). Masalah manajerial yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tantangan besar yang memengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Banyak pengusaha kecil yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan bisnisnya cenderung tidak terorganisir dengan baik. Pengelolaan bisnis

yang kurang terorganisir menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk mencapai kinerja yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, literasi keuangan, digitalisasi, dan dukungan pemerintah (Marrisa, 2023: 3).

UMKM merupakan sektor penting yang menopang perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya, yang dikenal dengan produk unggulan bordirnya. Bordir khas Tasikmalaya memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan dan keunikan desainnya, menjadikannya salah satu sektor yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Namun, UMKM bordir juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerja optimal. UMKM bordir di Kota Tasikmalaya memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Namun, tanpa akses ke modal kerja, literasi keuangan, dan transformasi digital yang memadai, pelaku usaha akan sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Disperindag Kota Tasikmalaya, 2024).

Di bawah ini adalah permasalahan yang menggambarkan adanya masalah dalam kinerja UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya adalah:

Tabel 1.2

Kinerja UMKM (Unit Usaha)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Bandung	42.385	40.136	41.220
Bandung Barat	12.005	22.366	20.213
Bekasi	20.315	20.610	19.111

(1)	(2)	(3)	(4)
Bogor	52.852	45.013	43.138
Ciamis	28.161	29.628	30.454
Cianjur	37.807	44.089	36.331
Cirebon	19.455	18.053	21.939
Garut	54.630	62.842	69.365
Indramayu	15.052	16.481	18.946
Karawang	15.257	14.239	15.410
Kota Banjar	4.961	3.786	4.609
Kota Bekasi	8.070	10.824	8.971
Kota Bogor	6.698	5.669	4.620
Kota Cimahi	6.538	6.552	6.087
Kota Cirebon	5.298	4.767	4.335
Kota Depok	14.716	13.916	11.429
Kota Sukabumi	4.694	5.392	5.787
Kota Tasikmalaya	33.089	30.306	26.706
Kuningan	9.374	16.180	11.317
Majalengka	28.762	26.634	33.468
Pangandaran	28.111	12.906	32.043
Provinsi Jawa Barat	625.943	622.225	667.795
Purwakarta	11.566	14.504	13.486
Subang	25.091	18.014	16.958
Sukabumi	52.953	51.796	51.307
Sumedang	16.166	19.160	24.739
Kab. Tasikmalaya	53.601	46.132	77.632

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023

Penulis akan mengambil UMKM di Kota Tasikmalaya, karena bisa dilihat adanya penurunan unit yang menggambarkan menurunnya kinerja UMKM yang menyebabkan menurunnya unit usaha yang disebabkan kebangkrutan yang dipengaruhi oleh kurangnya literasi, inklusi dan sikap keuangan dalam pengelolaan usahanya (DJP, 2024).

Penyebaran UMKM di Kota Tasikmalaya dapat dijelaskan pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3

Jumlah UMKM Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Jenis UMKM	Jumlah
Bordir	1.351
Kerajinan Bambu	173
Mendong	75
Alas Kaki	509
Meubeul	202
Batik	41
Payung Geulis	7
Makanan Olahan	553

Sumber: Disperindag Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya, jumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut terbilang sangat banyak dan berperan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pertumbuhan UMKM di Kota Tasikmalaya juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, kemajuan yang dicapai tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Khusus untuk sektor industri bordir, tercatat terdapat sebanyak 1.351 unit usaha yang aktif beroperasi di Kota Tasikmalaya (Disperindag Kota Tasikmalaya, 2024).

Permasalahan yang muncul dari UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan keuangan khususnya dalam hal pemilihan modal kerjanya dari layanan pembiayaan keuangan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mempermudah akses terhadap layanan keuangan. Banyaknya UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. Banyak pelaku UMKM menghabiskan sebagian besar waktu untuk Operasionalisasi harian bisnis. Banyak UMKM yang tidak memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman. Sikap pelaku UMKM sering kali melakukan pengeluaran tanpa perencanaan yang matang, seperti pembelian peralatan atau bahan baku yang tidak mendesak, yang dapat mengganggu aliran kas dan anggaran Operasionalisasi. Tidak memiliki rencana keuangan jangka panjang yang jelas. Pelaku UMKM tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengawasi pengeluaran bisnis, yang dapat menyebabkan pemborosan atau pengeluaran yang tidak terduga dan tidak secara rutin memantau dan menganalisis biaya.

Penelitian ini sangat penting diteliti, karena Kota Tasikmalaya dikenal sebagai sentral industri bordir yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya. Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan sikap keuangan menjadi faktor krusial dalam pengelolaan keuangan yang baik dan pengambilan keputusan usaha yang tepat. Kinerja dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan. Dengan literasi, inklusi, dan sikap keuangan yang baik, UMKM dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing di pasar (Hasibuan, 2020). Berdasarkan permasalahan mengenai

kinerja UMKM maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Bordir Di Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menyusun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan, dan kinerja UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan dan kinerja UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan dan kinerja UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya
2. Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan terhadap kinerja UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan, dengan fokus pada aspek literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan, dan kinerja UMKM.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai tolak ukur keberhasilan institusi dalam mencetak lulusan yang mampu menerapkan ilmu yang relevan di dunia nyata. Menjadi tambahan literatur akademik yang relevan, khususnya dalam topik literasi keuangan dan kinerja UMKM, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar-mengajar.

c. Bagi Pihak Lain

Menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian serupa, baik untuk melanjutkan penelitian ini maupun untuk membandingkan hasil penelitian.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh secara langsung atau menggunakan data primer pada UMKM Bordir di Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama delapan bulan, terhitung mulai dari bulan September sampai dengan bulan Juni 2025. Jadwal penelitian terlampir (Lampiran 1).